

MINORITAS DI TENGAH MAYORITAS: INTERAKSI SOSIAL KATOLIK DAN ISLAM DI KOTA PALEMBANG

Reslawati¹

Abstrak

Ketika masyarakat dapat berpegangan tangan untuk membangun suatu kebersamaan dalam keberbedaan, hidup berdampingan secara rukun dan damai sebagai suatu komunitas sosial, melakukan interaksi komunal yang efektif, maka masyarakat dapat menjadikan perbedaan sebagai suatu kekuatan baru dalam membangun kehidupan yang harmonis. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, sikap toleransi hidup rukun beragama sangatlah diperlukan untuk meningkatkan rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Bila sikap toleransi yang muncul tidak dilandasi nilai-nilai yang lahir atas kesadaran yang tulus, maka dapat menjadi bom waktu di kemudian hari. Dalam masyarakat plural, isu-isu etnik, ras, dan agama sangat rentan dan paling mudah menjadi pemicu munculnya saling curiga-mencurigai (prasangka), saling tidak percaya, dan bahkan saling tuduh-menuduh satu sama lain. Agar tidak terjadi konflik dan ketegangan sosial, maka perlu ada sikap pluralisme dalam masyarakat.

Kata Kunci: Interaksi sosial, Kelompok minoritas, Kelompok mayoritas, Agama, Palembang

PENDAHULUAN

Ketika menyoroti adanya penyebaran etnis, ras, kelompok, budaya, dan agama di belahan dunia dan bermuara pada satu wilayah atau negara, tampak kelompok minoritas selalu dalam posisi yang lemah, terdiskriminasikan, diperlakukan tidak adil, dikambinghitamkan dan bahkan dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan atau mayoritas. Amerika yang terkenal dengan negara demokrasi pun tidak mampu untuk meletakkan kesetaraan antara kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas, di mana *black people* dianggap sebagai minoritas karena tidak memiliki kesamaan hak suara. Muslim Afrika yang berhijrah ke Amerika tahun 1492 hampir tidak pernah diizinkan oleh majikan mereka yang beragama Kristiani untuk menjalankan ibadah agamanya (Islam), bahkan mereka dipaksa

untuk pindah ke agama Kristiani (Eck, 50: 2005). Di Timur Tengah mayoritas memaksa minoritas untuk loyal sebagai warga negara, kelompok fundamentalis Islam menganggap non-muslim sebagai kaum *dzimmi*. Di Amerika, Protestan berkulit putih adalah kelompok mayoritas, apabila ada kelompok Katolik berkulit putih maka mereka dianggap minoritas karena agama yang mereka anut berbeda dengan Protestan yang mayoritas (Liliweri, 2005).

Pada proposisi lain, secara kuantitatif kelompok mayoritas di suatu negara atau wilayah tertentu lebih dominan, namun dalam bidang-bidang tertentu ia menjadi minoritas, atau sebaliknya ia kelompok minoritas namun dalam hal tertentu menjadi mayoritas di tengah-tengah kelompok mayoritas itu sendiri. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, dalam hal tertentu justru tidak dominan, katakanlah dalam

¹ Penulis adalah peneliti di Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, yang menempuh pendidikan S1 dari Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang dan pendidikan Pascasarjana (S2) di Bidang Komunikasi Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia banyak menulis di berbagai media cetak dan pernah menjadi jurnalis di Surat Kabar Harian di Bandar Lampung dan beberapa majalah di Jakarta. Penulis juga sebagai peneliti sekaligus Sekretaris Eksekutif di Pusat Pengembangan Informasi dan Intelektual Jakarta.

hal ekonomi. Etnis Cina merupakan kelompok minoritas, tetapi hampir 80% menguasai perekonomian Indonesia. Di Jayapura komunitas Kristen merupakan kelompok mayoritas, sedangkan komunitas non-Kristen merupakan kelompok minoritas, namun mereka sebagai pendatang secara ekonomi sedikit lebih baik daripada kelompok Kristen. Sementara Muslim Bali selaku minoritas sebagai kelompok termarginal di antara kelompok mayoritas Hindu yang ada di sana.

Gambaran tersebut bukan suatu persoalan ketika masyarakat dapat berpegangan tangan untuk membangun suatu kebersamaan dalam keberbedaan, hidup berdampingan secara rukun dan damai sebagai suatu komunitas sosial, melakukan interaksi komunal yang efektif. Masyarakat dapat menjadikan perbedaan sebagai suatu kekuatan baru dalam membangun kehidupan yang harmonis. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, sikap toleransi hidup rukun beragama sangatlah diperlukan untuk meningkatkan rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Bila sikap toleransi yang muncul tidak dilandasi nilai-nilai yang lahir atas kesadaran yang tulus, maka dapat menjadi "bom waktu" di kemudian hari. Hal ini sangat berbahaya, dan akan menimbulkan konflik berakibat perpecahan di antara individu, kelompok, masyarakat bahkan bangsa, dan akan menggoyahkan rasa persatuan yang selama ini telah terbangun.

Dalam masyarakat plural, isu-isu etnik, ras, dan agama sangat rentan dan paling mudah menjadi pemicu munculnya saling curiga-mencurigai (prasangka), saling tidak percaya dan bahkan saling tuduh-menuduh satu sama lain. Agar tidak terjadi konflik dan ketegangan sosial, perlu ada sikap pluralisme dalam masyarakat, baik itu melalui asimilasi etnis ataupun agama. Menyatukan segala bentuk perbedaan, menyeimbangkan perbedaan sosial,

dan meminimalisasi diskriminasi antarkelompok dan antargolongan².

Diskriminasi dapat tercipta apabila adanya perlakuan ketidakadilan sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, kesejahteraan sosial, bahkan pembagian wilayah kerja yang tidak seimbang, dan lain-lain yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi. Bila keadaan ini dibiarkan akan berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan dalam bermasyarakat. Untuk itu perlu ada suatu solusi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang punya potensi konflik. Konflik tidak akan terjadi apabila di antara umat saling membangun dan mengadaptasi diri melalui penciptaan cara-cara baru berinteraksi.

Interaksi sosial antarkelompok agama sangatlah diperlukan sebagai jembatan sosialisasi kemasyarakatan dalam membangun kerukunan hidup di antara kelompok agama. Bentuk interaksi yang paling efektif adalah melakukan komunikasi yang terus-menerus di antara setiap kelompok agama, baik melakukan kegiatan bersama atau melalui dialog lintas agama. Bisa juga membentuk wadah kerukunan umat beragama dan dapat diprakarsai oleh siapa pun yang merindukan serta menginginkan hidup berdampingan dalam keberbedaan agama secara rukun dan damai. Sejalan dengan hal tersebut Diana L Eck (2005) mengungkapkan bahwa kesatuan kita dalam banyak agama tidak akan pernah menggabungkan agama, menjadi satu agama, karena setiap agama berbeda. Memang akan banyak perpindahan agama, pernikahan antarpasangan yang berbeda agama, serta bentuk-bentuk penyatuan agama atau aliran yang bersifat umum maupun pribadi, namun tidak akan ada peleburan agama yang meluas atau kebulatan suara dalam hal kebenaran agama.

² Prasangka adalah salah satu rintangan atau hambatan berat bagi kegiatan komunikasi karena orang yang berprasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar syakwasangka, tanpa menggunakan pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata. Karena itu, sekali prasangka itu sudah mencekam, orang tidak akan dapat berpikir objektif, dan segala apa yang dilihatnya selalu akan dinilainya secara negatif (Effendi, 1981).

Kesatuan kita akan lebih bersifat sipil yaitu suatu kesatuan komitmen terhadap persetujuan bersama sebagai warga negara yang memiliki bermacam-macam agama dan kepercayaan, menciptakan dan memelihara kesatuan, banyak hal penuh perpecahan dalam masyarakat berbeda agama, namun kita dapat membuktikan bahwa masyarakat yang multireligius dapat dipelihara walau itu tidak mudah, asalkan ada *political will* yang kuat dari setiap individu, kelompok maupun golongan untuk mewujudkannya

MINORITAS-MAYORITAS DALAM KONTEKS KEAGAMAAN

Secara teoritis kelompok minoritas dan mayoritas selalu dilihat dari berbagai aspek kepentingan, ada tinjauan secara kualitatif, kuantitatif, etnis, ras, budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan hampir tidak ditemukan teori kelompok minoritas dan mayoritas dari sudut pandang kelompok agama. Ketika perbincangan mengenai kelompok suatu agama, maka hampir setiap individu merasakan sangat sensitif dan rentan. Orang dapat tersinggung dan bahkan saling membunuh bila menyentuh wilayah agama masing-masing dan bahkan dapat memicu konflik di antara umat beragama. Oleh karena itu, persoalan agama bisa menjadi potensi konflik bila salah digunakan, dan bila disampaikan secara benar, akan menjadi sumber kekuatan persatuan, tergantung mana yang akan dimanfaatkan oleh suatu kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Liliweri (2005: 99) minoritas kelompok berdasarkan agama selalu digambarkan oleh pengelompokan sejumlah orang beragama tertentu, yang secara kuantitatif maupun kualitatif berbeda dengan agama kelompok mayoritas. Di Indonesia, secara nasional orang selalu mengatakan Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Artinya, kelompok Islam merupakan mayoritas dan kelompok agama lainnya merupakan minoritas. Namun di bagian tertentu wilayah Indonesia lainnya ada kelompok mayoritas yang non-muslim, seperti di Provinsi NTT dapat dikatakan "provinsi Kristen" yang menggambarkan penduduk di wilayah ini mayoritas kelompok keagamaan

Kristen, sedangkan kelompok Islam merupakan penduduk minoritas.

Sehubungan dengan relasi antarkelompok, Kinloch mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kelompok minoritas dan mayoritas dapat dilihat dari dimensi sejarah, dimensi demografi, dimensi sikap, dimensi institusi, dimensi gerakan sosial (keagamaan).

Dari dimensi sejarah diarahkan pada tumbuh dan berkembangnya hubungan antarkelompok. Bilamanakah kontak pertama antara kelompok minoritas dan mayoritas terjalin. Dari dimensi sikap dapat diamati sikap anggota suatu kelompok terhadap anggota kelompok lain dan sebaliknya. Bagaimanakah misalnya, sikap anggota kelompok agama Katolik selaku minoritas terhadap kelompok Islam selaku mayoritas di Kecamatan Sako dan sebaliknya? Stereotipe dan prasangka apa terhadap kelompok Katolik oleh kelompok Islam atau sebaliknya? Misalnya, stereotipe dan prasangka kelompok Islam tentang adanya pendirian gereja di Kecamatan Sako berdampak pada pengkristenisian kelompok Islam di wilayah tersebut. Ada asumsi, perasaan terdiskriminasi karena perlakuan oknum aparat pemerintah kepada kelompok Katolik dalam pendirian rumah ibadah. Dari dimensi gerakan sosial (keagamaan), tampak berbagai gerakan sosial yang sering dilancarkan suatu kelompok untuk membebaskan diri dari dominasi kelompok lain.

Dimensi perilaku dan perilaku kolektif yang termasuk dalam dimensi kolektif adalah perilaku satu kelompok terhadap anggota kelompok lain, seperti misalnya perilaku diskriminasi dan pemeliharaan jarak sosial. Selain itu, hubungan antara kelompok pun sering diwarnai oleh peristiwa perilaku kolektif seperti demonstrasi protes, hura-hura, perusakan dan pembunuhan, serta bentrokan fisik, misalnya peristiwa-peristiwa kerusuhan di Ambon, Poso, Papua, Aceh, dan berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan sejumlah harta benda.

INTERAKSI SOSIAL UMAT BERAGAMA

Indonesia merupakan negara yang pluralistik. Kelompok keagamaannya sangatlah

beragam di masyarakat. Keberagaman itu dapat berdampak negatif bagi interaksi sosial umat beragama, jika tiap-tiap kelompok agama lebih cenderung mengedepankan egosentrisnya, seperti anggapan agama kamilah yang paling benar dan menonjolkan keunggulan kelompoknya masing-masing. Oleh karenanya Achmad Fedi Yani Syaifuddin (1986) mengatakan agar terjadi integrasi antarkelompok dalam masyarakat, harus tercipta sejumlah pranata yang mengikat semua anggota kelompok sosial, baik etnis maupun agama, sehingga setiap warga dapat mengidentifikasi dirinya pada suatu ciri yang juga dimiliki oleh kelompok sosial yang lain. Pranata itu mengedepankan nilai-nilai universal yang bisa diacu oleh setiap kelompok agama tanpa menanggalkan identitas agamanya masing-masing.

Kemampuan membentuk pranata atau lembaga ini sebangun dengan tumbuh kembangnya nilai-nilai keadaban (*civic values*) di masyarakat. Dengan demikian, setiap orang dalam kelompok akan dapat menyelesaikan semua persoalannya melalui kelembagaan dengan aturan-aturan yang berlaku (*rule of law*) yang mereka buat secara bersama-sama. Oleh sebab itulah, dalam interaksi sosial di masyarakat baik individu, kelompok maupun lembaga, mereka akan hidup saling membutuhkan, saling bergantung, saling mempengaruhi, saling menjaga dan menghargai dalam harmonitas sosial yang terbina berdasarkan nilai dan norma (institusi sosial) yang berlaku, ditaati dan dijadikan pedoman bertindak dalam berinteraksi antarsesama warga dalam hidup keseharian mereka (*social interaction and every day life*). Adapun yang disebut norma itu berisi pedoman, tata cara atau kaidah-kaidah tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sedangkan nilai mengatur bagaimana setiap orang anggota masyarakat harus berperilaku baik dan menghindarkan yang tidak baik, sebagaimana diungkapkan Andrik Purwasito. Menurut Bintarto (1983:61), interaksi terjadi karena adanya kontak atau hubungan antara dua atau

lebih wilayah/kelompok dan dari kontak itu timbul sesuatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu.

Umat menurut W.J.S. Poerwadarminto diartikan para penganut sesuatu agama atau nabi (Agama Islam-Kristen; orang banyak; khalayak ramai; publik-manusia; sekalian bangsa manusia). Agama sering kali dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Oleh sebab itu, setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Selain itu, juga sangat dipengaruhi aspek budaya yang melingkupi kehidupan masyarakat tertentu. Interdependensi antara agama dan masyarakat menunjukkan hubungan yang timbal balik, yaitu pertama, pengaruh agama terhadap masyarakat terlihat dalam pembentukan pengetahuan, pengembangan, dan penentuan kelompok keagamaan spesifik yang baru. Kedua, pengaruh masyarakat terhadap agama, terlihat dalam faktor-faktor sosial budaya yang memberikan nuansa dan keberagaman perasaan dan sikap keagamaan yang terdapat dalam suatu lingkungan atau kelompok sosial tertentu (Tischle, 1990:380)

Dari definisi di atas maka yang dimaksud interaksi sosial umat beragama dalam tulisan ini adalah hubungan antarkelompok keagamaan minoritas dengan kelompok keagamaan mayoritas pada penganut atau pemeluk berbagai agama yang ada di Kecamatan Sako Kota Palembang. Tulisan ini lebih memfokuskan pada kondisi dan posisi kehidupan antara kelompok Katolik selaku minoritas dalam hubungan dengan kelompok Islam selaku mayoritas.³

Mengintip Minoritas Katolik di Palembang

Bumi Sriwijaya merupakan sebutan lain untuk kota empek-empek yang terkenal itu. Ada alasan kenapa sebutan itu melekat di dalam masyarakat Palembang. Sejarah mencatat pernah berdiri sebuah kerajaan yang menjadi pusat pendidikan dan budaya agama

³ Sumber data untuk naskah ini dari penelitian yang dilakukan penulis tahun 2005 di Palembang.

Budha, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sriwijaya runtuh dan berdirilah Kesultanan Palembang Darussalam, dengan rajanya yang terkenal Sultan Mahmud Badaruddin II (nama sultan diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II). Masyarakatnya beragam baik dari segi etnis maupun agama. Berdasarkan, Jumlah penduduk menurut Agama yang dianut tahun 2003; umat Islam berjumlah 1.183.096 jiwa, Katolik 25.969 jiwa, Kristen 35.722 jiwa, Budha 39.014 jiwa, Hindu 3.633 jiwa. Umat Islam secara kuantitatif merupakan kelompok mayoritas di daerah ini, sedangkan umat Katolik merupakan kelompok minoritas urutan ketiga setelah Kristen. Umat Katolik sebagai kelompok minoritas bersifat mengelompok dan tidak menyebar secara diaspora. Diasumsikan umat Katolik selaku minoritas mengadakan relasi sosial, baik intern umat Katolik maupun terhadap umat lainnya, terutama dengan umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Sementara kelompok minoritas lainnya seperti Kristen, Budha, dan Hindu menyebar di beberapa tempat dan tidak mengelompok. Dengan demikian, hubungan interaksi sosial baik intern kelompok sendiri maupun terhadap kelompok lainnya tidak begitu dirasakan. Untuk umat Hindu secara kuantitas tersebar di Kecamatan Kalidoni (sepuluh jiwa dan di Seberang Ulu dua puluh tiga jiwa). Kelompok Minoritas Budha memiliki sebaran yang tidak merata (tidak mengelompok).

Minoritas Katolik di daerah ini mengelompok dan terpusat di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sako yang terletak di seberang Ilir bagian Timur Kota Palembang. Penduduknya berjumlah 101.299 orang (laki-laki 51.236 orang dan perempuan 50.056). Adapun penduduk menurut agama adalah 36.340 orang beragama Islam; 580 orang beragama Kristen; 486 beragama Katolik, 71 orang beragama Budha.

Di daerah ini umat beragama melakukan aktivitas keagamaannya sesuai dengan tradisi ritual mereka masing-masing. Interaksi kelompok mayoritas (Islam) dan kelompok

minoritas (Katolik, Budha, dan Hindu) secara umum terkategori harmonis⁴. Begitu juga antara umat Katolik dan Islam. Tidak dimungkiri pernah terjadi ketegangan di antara dua kelompok tersebut, tetapi tidak sampai terjadi konflik fisik. Ketegangan terjadi disebabkan kesalahpahaman yang karena ketidakpahaman di antara umat masing-masing dalam memandang sesuatu persoalan di antara kedua kelompok tersebut; ketidakpahaman kelompok Islam terhadap adanya pemisahan antara Katolik dan Kristen—kelompok Islam menganggap kelompok Katolik dan Kelompok Kristen (dulu Kristen Protestan) adalah sama yaitu kelompok Kristen saja. Sekalipun antara Katolik dan Kristen mempunyai kesamaan, namun mereka tidak dapat dikatakan sama, mereka tetap berbeda. Ketegangan ini juga disebabkan adanya asumsi bahwa kelompok Kristen akan melakukan Kristenisasi besar-besaran terhadap kelompok agama lain di lingkungan agama tertentu; adanya perasaan di perlakukan tidak adil dalam hal birokrasi, seperti merasa dipersulit dalam pendirian rumah ibadah oleh oknum tertentu, dan merasa didiskriminasikan dalam pendistribusian di berbagai sektor, dan lain-lain.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Adrik Purwasito (2003) bahwa pada umumnya kelompok minoritas dimana pun selalu menemui kesulitan/hambatan dan ganjalan komunikasi ketika berhadapan dengan kelompok mayoritas, hal ini dilatarbelakangi oleh: (1) prasangka historis; (2) diskriminasi; (3) perasaan superioritas *in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior kelompok lain atau *out group*. Lebih lanjut Liliwari (2005:120) mengungkapkan bahwa di Timur Tengah unsur-unsur seperti prasangka, kesalahpahaman, stereotipe, dan kekerasan satu generasi ke generasi lain terjadi, di mana kelompok minoritas selalu dijadikan “kambing hitam” hampir dalam berbagai peristiwa. Mayoritas terlalu memaksa loyalitas dari anggota minoritas hanya dengan alasan sebagai warga negara sehingga kaum minoritas harus menempatkan diri sebagai subdominasi

⁴Harmonis artinya hampir tidak pernah terjadi konflik antara kelompok tersebut.

di bawah kaum mayoritas, misalnya Yahudi di negara-negara Kristen Eropa merasa tersubdominasi. Beda halnya dengan di Kecamatan Sako, ketegangan dan kesalahpahaman di Kecamatan Sako dapat diatasi setelah semua pihak yang merasa terlibat dan merasa dirugikan bertemu dan berdialog. Oleh karena itu, peristiwa semacam ini, sampai saat ini tidak pernah terulang kembali.

Dalam catatan sejarah masuknya umat Katolik di Palembang (1925) dibawa oleh Pastor M. Neilen, SCJ sebagai pastor pertama. Kemudian mendirikan keuskupan pada tahun 1961 dengan uskup pertama Mgr. Henricus Mekkelholt, SCJ. Menjelang pecah perang di Asia Tenggara jumlah umat Katolik 4500 orang, yang tersebar di Lampung 1500 orang, sisanya di Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Adapun jumlah imam-imam 25 orang, frater-frater guru dan suster-suster 84 orang; sekolah: SKK 13, SD 12, Sekolah Rakyat 33, Sekolah Mulo 2 dan rumah sakit 4.

Setelah perang kemerdekaan tahun 1945, umat Katolik dapat meneruskan ibadah mereka dan sekaligus melakukan syiarnya. Terbukti di beberapa daerah di Palembang, seperti Tanjung Sakti, Talang Jawa, Baturaja, dan lain-lain, kelompok Katolik dapat berkembang dengan baik. Peristiwa bersejarah kelompok Katolik di Palembang menyebutkan, dalam laporannya Mgr. Mekkelholt, bahwa di daerah Batu Putih dan Saralang Tanjung Sakti, orang Islam dan pemerintahannya tidak terlalu kuat dalam menjalankan agamanya sehingga ada beberapa ratus umat Islam yang belajar dengan orang Katolik dan 40 orang dipemandikan, mereka berpindah agama menjadi agama Katolik.

Pada perkembangannya umat Katolik menyebar hampir di sudut-sudut pusat kota terutama di Kecamatan Sako, awalnya hanya beberapa jiwa. Sebelum tahun 1979, RI Soediropranoto pendiri sekaligus Ketua

Yayasan Xaverius Pusat Palembang membangun sekolah Xaverius. Umat Katolik sangat sedikit sekali waktu itu dan tempat tinggalnya berjauhan. Semakin hari umatnya semakin berkembang setelah didirikannya SD Xaverius 9 (1980/1981). Banyak anak-anak Katolik tersebar di luar daerah ini, setelah ada sekolah mereka pindah dan bersekolah di sekolah yang baru tersebut. Dalam hal kegiatan keagamaan pada waktu itu Gereja Katolik melakukan misa kudus, doa rosario keliling, pelayanan imam untuk misa kudus.

Semakin hari umat di daerah ini semakin berkembang, sementara wilayah *kring* (kelompok umat melakukan kegiatan dalam satu wilayah) tempatnya terlalu luas dan tempat tinggal umat berjauhan, maka nama *kring* menjadi *stasi* (tempat kegiatan umat Katolik) dan diberi nama Stasi Santo Petrus. Tahun 1983/1984 di dirikanlah TK Xaverius 9 di Kenten. Dengan adanya TK tersebut umat Katolik semakin banyak karena berpindah dari tempat lain ke daerah Sako⁵.

Tahun 1981/1982 pemerintah membangun Perumnas di Kecamatan Sako, maka makin banyak umat Katolik pindah ke daerah ini sehingga jumlah umat semakin bertambah. Lebih lanjut sesuai dengan perkembangannya Stasi Santo Petrus menjadi wilayah Paroki Sanfades Sungai Buah Palembang. Sejak itulah mulai dibentuk kepengurusan stasi⁶ yang sangat sederhana. Tahun-tahun berikutnya umat Katolik semakin bertambah (135 jiwa) sehingga wilayah stasi Santo Petrus berkembang dan menyebar di Kenten Laut, Kenten Permai, Kenten Indah, Perumahan PT Pusri Sako, Perumahan DPR, Perumnas. Karena jumlah umat semakin banyak dan wilayah stasi semakin luas, dibentuklah Dewan Stasi. Perkembangan umat di daerah ini begitu cepatnya sehingga stasi tidak mampu lagi menampung umat yang terus bertambah. Oleh karena itu, stasi dibangun menjadi sebuah

⁵ Hasil wawancara Tim peneliti dengan Romo Endro selaku Pastor Gereja Santo Petrus, pada tanggal 8 Juni 2005 bertempat di rumah Pastoran yang masih satu lokasi dengan Gereja Santo Petrus.

⁶ Fungsi stasi saat itu adalah mengorganisir kegiatan gerejani, misa kudus, pertemuan kelompok, rosario keliling, demikian penjelasan Romo Endro saat pertama kali kami bersilatrahmi dengan beliau di Gereja Santo Petrus.

gereja, hal ini didasari dengan semangat hasil Sinode Keuskupan Palembang⁷ dan Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia mengenai Pemberdayaan Basis Gerejani. Pada 23 Pebruari 1983, Gereja Santo Petrus diresmikan dan statusnya menjadi paroki, yang sebelumnya dari *stasi* menjadi *quasi* dan akhirnya menjadi *Paroki*.

Dalam Proses pendirian Gereja Santo Petrus terjadi kesalahpahaman antara kelompok Islam dengan kelompok Katolik. Pada November 1996, umat Katolik di daerah ini ingin mendirikan gereja, tetapi ditentang oleh kelompok Islam. Kelompok penentang bukan warga tempat akan dibangunnya tersebut. Kelompok Islam mendapatkan informasi akan dibangun gereja terbesar di Asia Tenggara dan akan adanya Kristenisasi besar-besaran terhadap umat Islam Palembang yang akan berpusat di daerah ini. Akibatnya, masyarakat menolak dengan dalih apa pun pendirian gereja tidak dibenarkan⁸. Sementara itu warga/kelompok Islam yang berada di wilayah gereja telah menyetujui pendirian gereja tersebut. Ketegangan sempat terjadi di antara dua kelompok, namun setelah dilakukan komunikasi, koordinasi dan adanya penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait, ketegangan dapat diatasi. Apalagi diketahui bahwa pihak gereja memiliki izin pembangunan gereja maka warga bisa mengerti.

Namun disayangkan, pada saat gereja hampir selesai dalam pembangunannya pada Februari tahun 1999 malah terbakar habis⁹. Penyebab kebakaran sampai saat ini masih pro dan kontra dan belum diketahui. Berbagai asumsi muncul di masyarakat, gereja sengaja dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menginginkan

dibangunnya gereja, mengingat pernah terjadi ketegangan sebelumnya¹⁰. Ada yang berpendapat penyebabnya adalah karena puntung rokok¹¹ dan ada yang mengatakan kebakaran karena korsleting listrik¹².

Setelah ditangani aparat terkait dan dilakukan koordinasi antara pihak gereja dengan semua pihak serta melibatkan tokoh agama masing-masing dan juga tokoh masyarakat, maka persoalan ini dapat diatasi dengan baik, serta kasusnya ditutup dan dianggap selesai. Selanjutnya pembangunan gereja diteruskan hingga selesai pembangunannya tanpa ada gangguan dan hambatan sedikit pun sampai akhirnya status gereja menjadi paroki.

Setelah menjadi paroki, Gereja Santo Petrus, semakin baik dalam menata intern umatnya. Hal ini terlihat dari penjadwalan kegiatan gereja yang sangat tertata rapi dalam pelayanan umat, mulai dari penyusunan doa, misa, pentahbisan telah disusun secara sistematis oleh pihak keuskupan, umat tunduk dan patuh mengikuti apa yang menjadi ketetapan gereja. Kepatuhan ini juga berdampak secara internal sehingga umat tidak banyak mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan, dan interaksi di antara mereka cenderung positif serta saling mendukung. Apalagi Gereja Katolik hanya merujuk kepada Gereja Roma dengan pemimpinnya Paus sebagai imam tertinggi.

Umat Katolik di daerah ini dalam aktivitasnya lebih menekankan kepada peningkatan sumber daya manusianya melalui jalur pendidikan, seperti didirikannya Sekolah Xaverius yang tidak hanya diperuntukkan bagi umat Katolik tetapi juga untuk umat non-Katolik. Umat Katolik di daerah ini bukanlah tergolong kaum elite atau kelompok kelas menengah ke atas. Kehidupan mereka rata-

⁷ *Sinode* (berasal dari bahasa Yunani *Sin-hodos*) berarti berjalan atau berjamaah bersama. *Sinode Keuskupan* ialah sidang imam-imam dan orang beriman Kristiani yang terpilih dari gereja *particular*, untuk membantu uskup diosesan menurut norma kanon-kanon; Sidang Sinode dimaksudkan untuk membantu uskup dalam merumuskan kebijakan keuskupan dan merupakan sidang yang bersifat konsultatif.

⁸ Dialog dengan Dewan Gereja Santo Petrus didampingi oleh Leonardus Sutrisno dari Bidang penyuluhan Agama Bimas Katolik Kanwil Departemen Agama Palembang

⁹ Hasil wawancara dengan Pastor Romo Endro

¹⁰ Hasil wawancara dengan pengurus Gereja St. Petrus

¹¹ Hasil wawancara Pratu Suparno dari Kodim Sako

¹² Hasil wawancara dengan aparat kecamatan, kodim setempat, Bapak Ahmad Rosyid, S.Ag (Kepala KUA), dan Soewartono (Ketua RT 28 A RW 07 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sako di mana saat gereja dibangun).

rata sederhana dan bahkan ada yang tidak mampu. Untuk membantu umatnya, pihak gereja menyediakan koperasi simpan pinjam bagi kebutuhan pokok untuk umat; dari segi kesehatan, mereka mendirikan Rumah Sakit Charitas sebagai pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh umat Katolik dan masyarakat umum.

Dari hubungan intern yang ada di kalangan umat Katolik sebenarnya hampir sama yang terjadi dengan umat agama-agama lain. Misalnya, sikap tolong-menolong, saling memberi diajarkan oleh semua agama. Hanya yang menarik dari kelompok Katolik menganut sistem imamah (pen) yaitu tunduk kepada pemimpin yang tertinggi dalam hal ini Paus, dengan konsep imamah ini mengakibatkan dalam ajaran Katolik tidak terdapat aliran-aliran dalam agama seperti dalam agama-agama lainnya seperti Islam, Kristen, dan lain-lain. Hal ini juga berdampak secara intern hampir tidak ada gejolak ataupun konflik di kalangan umat Katolik dan kehidupan mereka tampak baik-baik saja dan harmonis.

Interaksi Sosial Kelompok Minoritas Katolik

Dalam perkembangannya umat Katolik di daerah ini semakin bertambah, tahun 2008 berjumlah 1.310 jiwa sedangkan Islam berjumlah 86.750 jiwa¹³. Selaku kelompok mayoritas, umat Islam seharusnya mendominasi kehidupan di daerah ini, namun faktanya tidak demikian. Perekonomian di daerah mempunyai keseimbangan dalam hal kepemilikan oleh setiap kelompok agama. Dari segi perdagangan, warung-warung, toko-toko dan pasar yang ada, penjualnya sebagian umat Islam, namun yang punya (pemilik) toko-toko atau warung-warung sebagian orang-orang kelompok non-Islam, atau sebaliknya. Begitupula dengan kepemilikan transportasi. Dari segi pendidikan terdapat sekolah agama Katolik dan non-Katolik, serta sekolah milik pemerintah, mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi.

Di sekolah agama, setiap kelompok agama melakukan pendidikan dan pembinaan sesuai dengan kurikulum masing-masing dan berlaku standar umum Pendidikan Nasional, begitu juga di sekolah-sekolah negeri. Ada yang menarik untuk disimak, yakni anak-anak kelompok agama Islam ada yang bersekolah di sekolah Katolik (SD, SMP, SMA), namun yang menjadi pertanyaan anak-anak Katolik tidak ada yang bersekolah di sekolah milik kelompok Islam.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan ini bisa terjadi. **Pertama**, dari segi kualitas sebenarnya sekolah kelompok agama Islam, mempunyai kualitas sama dengan sekolah milik Katolik (Xaverius), baik dari kurikulum, kualitas guru maupun fasilitas sekolah. Akan tetapi, ada opini yang membentuk animo masyarakat mengatakan bahwa Xaverius lebih baik kualitasnya daripada sekolah kelompok Islam sehingga orang tua kelompok Islam cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah Xaverius (Katolik). **Kedua**, sekolah Xaverius lebih terbuka dan menerima untuk anak-anak non-Katolik mengenyam pendidikan di sekolah mereka. Anak-anak Islam yang bersekolah di Xaverius mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang sama di sekolah ini tanpa ada perbedaan. Mereka berinteraksi satu sama lainnya seakan tidak ada perbedaan.

Di sekolah-sekolah kelompok Islam walaupun tidak ada larangan non-Muslim bersekolah di sana, namun ada keengganan untuk terbuka dan belum siap menerima kelompok lain untuk bergabung. Dan seperti orang tua kelompok Katolik enggan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah kelompok Islam, dengan alasan tertentu. Adapun di sekolah-sekolah negeri milik pemerintah, mayoritas didominasi oleh kelompok Muslim, walaupun ada juga kelompok lainnya, termasuk juga kelompok Katolik namun tidak banyak. Anak-anak yang kelompok Katolik tidak banyak yang bersekolah di sekolah milik pemerintah, ada asumsi di antara mereka merasa bukan "komunitasnya". Selain itu, karena kelompok Katolik mempunyai sekolah-

¹³ Membolehkan atau memberikan kelonggaran dalam perkawinan dengan agama lain dari kebiasaan tradisi gereja dengan alasan cinta kasih.

sekolah sendiri. Hal ini perlu disikapi secara bijaksana oleh semua pihak terkait, dalam rangka mencairkan sikap eksklusivisme dan egosentris kelompok serta untuk menciptakan suasana kondusif dan kesetaraan dalam kerukunan hidup antar umat beragama.

Umat yang berdomisili di daerah ini sangat heterogen dan kebanyakan migran dari Jawa. Selain suku Jawa, ada suku Sunda, suku Palembang dan sekitarnya, suku Bugis-Makassar, orang dari Lampung, dan lain-lain. Dalam relasi sosial, antarsuku tersebut, terutama yang beragama Katolik dan Islam di daerah ini tampak baik-baik saja dan harmonis. Begitu pula dalam menjalankan ibadah, mereka menjalaninya tanpa hambatan dan gangguan. Mereka membaaur dengan masyarakat dan mengikuti bahasa serta budaya setempat sehingga mereka dapat diterima secara baik oleh masyarakat mereka tinggal. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Parsudi (1972), bahwa migran Jawa yang berada di Bandung cenderung menjadi orang Sunda dalam upaya mereka untuk mentaati aturan yang berlaku di tempat-tempat umum. Ini terutama berlaku dalam kehidupan orang Jawa yang tergolong menengah ke bawah. Mereka turut aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan mereka sehingga ada kesan bahwa mereka berusaha untuk dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat yang berkebudayaan Sunda.

Anak-anak mereka yang bergaul bebas dengan teman-temannya yang Sunda di lingkungan sekolah dan tetangga, cenderung lebih fasih berbahasa dan berkelakuan seperti orang Sunda daripada sebagai anak orang Jawa. Hubungan antara orang-orang Sunda dan Jawa memperlihatkan keteraturan sosial. Walaupun konflik juga ada tapi tidak sampai terjadi pengaktifan kesukubangsaan masing-masing sehingga konflik terbatas pada skala yang kecil saja.

Apa yang diungkapkan oleh Parsudi hampir sama yang terlihat pada kelompok Katolik yang ada di Kecamatan Sako. Kelompok Katolik bersama masyarakat lainnya (kelompok Islam) secara bersama-sama melakukan kerja bakti untuk membersihkan kotoran yang ada di parit, di terminal, dan di pasar; di antara umat yang tinggal di daerah ini memperbaiki jalan rusak menuju ke arah perkampungan Katolik secara bersama-sama. Ada kerja sama mereka dalam bakti sosial. Pihak Gereja Katolik menyumbang beberapa karung semen untuk perbaikan jalan, sementara pasir dan batu dari kelompok Islam. Mereka melakukannya secara suka rela dan swadaya.

Dalam hal perkawinan, antara kelompok Katolik dan Islam biasa terjadi. Selama ini tradisi gereja yang mensakralkan perkawinan sesama Katolik mengikat janji untuk sehidup semati dengan landasan cinta kasih seakan tak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Namun saat ini gereja Katolik memberikan *dispensasi* kepada umatnya untuk melakukan perkawinan dengan kelompok agama lain. Dalam agama Katolik ketentuan tentang hukum perkawinan campur dirinci dalam Hukum Kanonik¹⁴. Dalam kaitannya dengan ajaran agama-agama tentang kerukunan kehidupan beragama, Badan Litbang Agama Departemen Agama mengungkapkan ajaran-ajaran agama seperti agama Katolik bahwa,

Dalam agama Katolik ada dasar keyakinan bahwa semua bangsa yang hidup di dunia berasal dari satu Bapak. Karenanya orang Katolik harus berhubungan dengan orang di luar kelompoknya dengan penuh kasih dan menghargai mereka....

Yesus berdoa untuk semua orang. Semua bangsa dan umat beragama harus rukun, sesuai dengan isi surat Rasul Paulus kepada Jemaat Galatia.

¹⁴ Hukum Kanonik memakai istilah *de matrimoniismixtis* dengan terjemah bahasa Indonesia "Perkawinan Campuran". Lihat, Kartosiswoyo PR, V. Kitab Hukum Kanonik, Sekretariat MAWI dan OBOR Jakarta, 185 halaman 463. Tentang rumusan kawin campur ini Hukum Kanonik mengalami perubahan dari ketentuan hasil Konsili Vatikan I dengan Konsili Vatikan II karena ada perubahan pandangan dasar Gereja Roma Katolik dalam hubungannya dengan umat penganut agama lain.

Dalam Kitab Injil, Yohanes 13:31-35, disebutkan:

Yesus memberikan tanda kepada rasul-rasul-Nya bahwa Ia tidak selamanya bersama mereka guna mempersatukan mereka. Ada saatnya Ia kembali ke Bapa-Nya di surga, karena itu: "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kami demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi".

Dalam perjalanan keagamaannya umat Katolik dipimpin oleh seorang Paus yang berpusat di Vatikan Roma, Paus Yohanes Paulus II dalam surat pada hari perdamaian sedunia tahun 2003¹⁵ menuliskan: masyarakat manusia, bila ingin teratur dan produktif, harus didasarkan pada kaidah-kaidah, yaitu bahwa setiap manusia diakui sebagai kepribadian, bahwa kodratnya dilengkapi dengan akal budi dan kehendak bebas. Memang, justru karena dia seorang pribadi, dia memiliki hak dan kewajiban yang secara langsung dan bersama-sama muncul dari kodratnya sendiri. Dan karena hak-hak ini bersifat universal dan tak dapat dilanggar bagaimana pun juga dan tak dapat diserahkan kepada siapa pun juga

Dalam ajaran Islam juga diatur bagaimana hidup dalam kerukunan antarumat beragama. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dalam Surat Al Baqarah: 119 disebutkan:

Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah swt. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Ali Imran : 110)

Dalam keadaan berbeda agama, agama Islam juga tidak melarang umat berbuat baik atau berhubungan baik dengan orang yang berbeda agama selama tidak mengusir umat Islam di mana mereka tinggal;

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik Allah maha menyukai orang-orang yang berlaku adil (Al Mumthanah: 8).

Umat Islam pun dibolehkan hidup bertetangga dan berdampingan secara damai atau hidup berbangsa dan bernegara dengan pemeluk agama lain, tanpa mencampuradukkan ajaran agama masing-masing, firman Allah: "bagimu agamu dan bagiku agamaku (Al Kafirun: 6)

Dari ajaran kedua kelompok agama tersebut, ternyata baik umat Katolik maupun umat Islam selalu siap dan terbuka serta saling menerima kehadiran kelompok agama masing-masing dan juga kelompok agama lainnya. Dengan demikian, mereka selalu siap untuk berbaur dan menyatu menjadi bagian dari kelompok lainnya, seperti halnya saat pembangunan Gereja Santo Petrus berlangsung. Ibu-ibu yang dari kelompok Islam bersama-sama dengan ibu-ibu dari kelompok Katolik menyiapkan makanan dan minuman untuk para pekerja/tukang (gorengan, kopi, dan makan siang). Begitu juga pada bulan Ramadan, pihak gereja menyiapkan makanan dan minuman untuk berbuka bagi kelompok Islam yang menjalankan ibadah puasa. Pada hari raya Islam maupun natal, masyarakat dari kedua kelompok saling bersilaturahmi untuk

¹⁵ *Pacem in Terris-Damai di Bumi, Keterlibatan Tak Pernah Henti*, pesan Yohanes Paulus II untuk perayaan hari perdamaian sedunia 1 Januari 2003.

mengucapkan salam dan saling memaafkan. Dengan tingkat pemahaman dan pengertian yang tinggi dan saling hidup berdampingan dengan keberbedaan keyakinan, ternyata kelompok Katolik dan kelompok Islam bisa hidup rukun dan damai di daerah ini.

Melihat fakta yang ada tersebut menunjukkan bahwa tingkat toleransi dan saling pengertian di antara kelompok Katolik dengan Islam cukup kuat. Karena adanya saling pengertian dan adanya saling mengakui eksistensi masing-masing selaku umat beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kaagamaan masing-masing. Menurut Abdillah sikap toleransi dalam masyarakat dapat dilihat dari sisi negatif (pasif) dan positif (aktif). Negatif artinya jika toleransi itu sebatas pada tidak mengganggu dan saling membiarkan orang lain mempraktikkan agamanya. Sementara yang positif adalah tidak sebatas itu, tapi juga berpartisipasi untuk memberikan bantuan, pertolongan.

Sesungguhnya kita dapat mengatakan sikap kelompok Islam di daerah tersebut termasuk kelompok positif, artinya kelompok Muslim tidak hanya sebatas pada tidak mengganggu dan membiarkan orang lain mempraktikkan agamanya tetapi lebih jauh dari itu yakni aktif memberikan bantuan, pertolongan, dan pembinaan. Interaksi yang terjadi selama ini di antara kedua kelompok disebabkan adanya ikatan yang kuat di antara mereka yang dibangun melalui kesadaran menjalankan nilai-nilai keagamaan masing-masing. Nilai-nilai tersebut dilestarikan melalui kegiatan kemasyarakatan sehingga kelompok minoritas tidak merasakan adanya perbedaan atau merasa didiskriminasikan oleh Islam selaku kelompok mayoritas dan bahkan mereka saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Sikap masyarakat di atas sejalan dengan ungkapan Andrik Purwasito, bahwa dalam interaksi sosial di masyarakat berlangsung interaksi antarkomponen baik secara individual, kelompok, maupun lembaga. Mereka hidup saling bergantung, saling mempengaruhi, saling menjaga dan saling menghargai dalam harmonitas sosial dan terbina berdasarkan nilai dan norma (institusi sosial) yang berlaku. Ditaati dan dijadikan pedoman bertindak dalam berinteraksi antarwarga dalam hidup

keseharian mereka (*social interaction and everyday life*).

SIKAP MAYORITAS

Dalam beberapa literature disebutkan bahwa kelompok mayoritas kerap kali bersikap dan memperlakukan kelompok minoritas sebagai kelompok yang tersubordinasi, terdiskriminasi dan kadang diperlakukan tidak manusiawi. Di beberapa negara maju hal ini juga terjadi, di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya 226.505.000 jiwa pada tahun 1980 dan mayoritas beragama Kristen dan berbahasa Inggris mendapatkan prioritas-prioritas serta kemudahan dalam berbagai aspek. Sementara itu, Katolik sebagai minoritas tetapi tidak berbahasa Inggris (Itali, Prancis, dan sebagainya), diperlakukan tidak adil dan terdiskriminasi. Umpamanya dalam hal pekerjaan, bagi mereka yang beragama Kristen lebih diprioritaskan mendapat pekerjaan daripada Katolik.

Sesungguhnya hubungan antara kelompok minoritas dan mayoritas baru mendatangkan masalah apabila kelompok mayoritas menerapkan sikap diskriminasi dan lebih mengedepankan arogansi mayoritasnya. Hasan Shadily (1983) mengungkapkan diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi. Diskriminasi dapat muncul dalam berbagai bidang, misalnya (1) diskriminasi pekerjaan, masih ingat kita bahwa di awal tahun 1980-an, perempuan-perempuan berjilbab di Republik kita yang tercinta ini dilarang mengenakan jilbabnya ketika mereka ingin melamar pekerjaan dan bahkan mereka ditolak untuk dapat bekerja, mereka terdiskriminasi di negerinya sendiri yang mayoritas penduduknya Islam; (2) diskriminasi politik, minoritas tidak diberikan hak pilihnya maupun hak dipilih dalam pemilihan kepala pemerintahan, misalnya Katolik di daerah Selatan Amerika dipukuli bila berani datang untuk memilih sehingga mereka kehilangan haknya untuk memilih; (3) diskriminasi di tempat umum, seperti restoran, hotel, rumah sakit, bis, dan lain-lain; (4) diskriminasi perumahan, kelompok minoritas ditolak untuk menyewakan atau menyewa rumah tempat tinggal, bahkan di beberapa tempat Universitas di Amerika

Serikat, siswa kulit berwarna dipersulit mendapatkan rumah kos atau asrama.

Diskriminasi dan ketidakadilan atas sikap dan perilaku kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dapat juga memunculkan ketegangan bahkan dendam yang berkepanjangan. Katakanlah antara Israel dan Palestina seakan tak pernah akan ada akhirnya peperangan karena faktor agama. Mereka memperebutkan negeri damai tempat kelahiran para nabi, kota suci bagi tempat ibadah kedua kelompok bangsa tersebut, dan mereka sama-sama mengklaim bahwa tempat tersebut adalah tempat suci milik salah satu agama di antara mereka. Saling ingin berkuasa dan saling ingin menguasai satu sama lainnya, saling ingin memiliki, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Bukankah semua agama mengajarkan kedamaian.

Di Indonesia, diskriminasi terjadi justru kepada kelompok mayoritas atas minoritas, di mana secara ekonomi kelompok minoritas lebih berkuasa. Hasil penelitian Leo Suryadinata (1984) mengungkapkan suku minoritas Tionghoa membentuk diri menjadi kelompok eksklusif dan menguasai perekonomian dan mempunyai hubungan kesetiaan dengan Cina (RRC) daripada kepada Indonesia. Namun seakan diskriminasi tersebut tidak terjadi dalam hubungan sehari-hari. Hal ini karena secara perlahan telah terjadinya akulturasi budaya di masyarakat¹⁶ baik itu kebudayaan setempat maupun kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, mulai dari kebudayaan Cina, India, negara-negara barat. Plus proses asimilasi atau pembauran bagi masyarakat Indonesia mudah terjadi. Asimilasi dapat cepat terjadi dengan adanya satu kewarganegaraan, memberikan hak dan kewajiban yang sama untuk semua golongan, dan akan menghilangkan beda antara golongan-golongan (amalgamasi).

Analisis sosiologi-antropologi¹⁷ membagi beberapa jenis asimilasi, yaitu: (1) *asimilasi*

budaya, proses pengadopsian nilai, kepercayaan, dogma, ideologi, bahasa dan sistem simbol dari suatu etnik atau dari beragam kelompok yang terbentuk sebuah kandungan nilai, kepercayaan, dogma, ideologi; (2) *asimilasi struktural*, proses penetrasi kebudayaan melalui kelompok primer seperti keluarga, teman dekat, klik dalam kelompok; (3) *asimilasi perkawinan*, untuk melahirkan keturunan baru; (4) *asimilasi sikap resepsional*, untuk mengurangi sikap diskriminasi atau mengurangi *stereotype*, *stigma*, label terhadap kelompok lain; (5) *asimilasi identifikasi*, proses identifikasi individu-individu dari suatu kelompok dengan menciptakan identitas personal mereka sendiri agar dapat berpartisipasi atau menanamkan pengaruhnya dalam institusi sosial lainnya; (6) *asimilasi kewarganegaraan*, dilakukan oleh kelompok tertentu dengan memasukkan nilai-nilai dasar kebudayaannya ke dalam arena politik, pemerintahan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada masyarakat Palembang pluralistik, juga telah mengalami asimilasi dalam kehidupannya sehingga masyarakat setempat mampu menerima segala kelompok, golongan, dan agama. Masyarakat dapat menerima keterbukaan dalam era globalisasi ini, dengan tidak memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sikap keterbukaan, toleransi, dan saling menghargai tampak jelas dalam kehidupan masyarakat di Sako yang didominasi oleh kelompok Islam.

Asimilasi tersebut telah membentuk interaksi sosial yang terjalin selama ini antara Katolik sebagai kelompok minoritas dan Islam. Di antara keduanya terbina kerja sama yang baik, bersikap setara dan tidak menunjukkan eksklusivisme, egoisme, serta saling mengakui eksistensi masing-masing. Umat Islam selaku kelompok mayoritas memberikan tempat secara proporsional dan tidak ada perlakuan sikap

¹⁶ Akulturasi adalah bersatunya beberapa kebudayaan golongan, mulai dari kontak hingga proses percampuran kebudayaan selanjutnya. Kebudayaan-kebudayaan itu tidak berkonflik satu sama lain atau kalau ada konflik maka konflik itu ditenangkan kembali berdasarkan memberi dan menerima (*give and take*).

¹⁷ Kabag Bimas Katolik Kanwil Sumatra Selatan, wawancara di lakukan tgl 7 Juni 2005 bertempat di ruang Bimas Katolik Kanwil Sumatra Selatan.

yang berbeda terhadap kelompok Katolik ataupun kelompok lainnya dalam berbagai aspek (ekonomi, pendidikan, budaya, sosial kemasyarakatan, politik, dan kebebasan menjalankan ibadah agama masing-masing), sekalipun mereka adalah kelompok minoritas.

Sikap tersebut ditunjukkan dengan dilibatkannya kelompok Katolik dalam berbagai kesempatan, kegiatan ataupun kepengurusan (RT, RW, LKMD, pegawai pemerintah, kelompok swadaya masyarakat, partai politik, dan lain-lain). Apalagi setelah dibentuknya Forum Komunikasi Antarumat Beragama yang dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi antarkelompok agama yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, setiap persoalan yang akan muncul dapat diantisipasi bahkan dieleminir agar tidak menjadi sumber konflik di tengah-tengah kelompok agama umumnya, Katolik dan Islam khususnya, sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang harmonis dan masyarakat dapat beribadat secara tenang dalam kehidupannya.

Kebiasaan masyarakat di daerah ini, dalam menempatkan atau memasukkan seseorang dalam suatu kepengurusan atau kegiatan, apakah sebagai ketua atau anggota dalam kegiatan tersebut, seperti tujuh belas agustus atau hari-hari besar lainnya, kerja bakti, kegiatan dialog atau kepengurusan seperti LKMD, Partai Politik, Forum Komunikasi Antarumat Beragama, dan lain-lain, tidak melihat seseorang itu karena faktor agamanya tetapi lebih melihat kepada kemampuan dan kualitas seseorang tersebut. Misalnya, ada seorang Ketua Rukun Tetangga yang beragama Katolik tetapi warganya sebagian besar adalah beragama Islam dan ada juga beragama Hindu. Orang tersebut di pilih menjadi Ketua Rukun Tetangga karena sikapnya yang baik, mau menolong orang lain, mau bekerja, cerdas, tidak membeda-bedakan antara satu warga dengan warga yang lain, sehingga orang di wilayah itu menyukai dan memilihnya. Dengan demikian, kelompok Katolik tidak merasakan perlakuan diskriminatif oleh kelompok Islam sebagai kelompok mayoritas dan sebaliknya.

Adanya sikap dan perlakuan yang sama di antara kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dapat menciptakan keharmonisan, ketentraman, dan kedamaian sehingga dapat tercipta kerukunan hidup di

antara umat beragama. Menurut Ridwan Lubis (1997), bahwa di kalangan penganut agama yang berbeda, hal yang dapat menimbulkan semangat kerukunan adalah adanya wadah lain dari agama yang mempertemukan mereka, seperti upacara-upacara budaya setempat.

Walaupun Islam kelompok mayoritas dan Katolik sebagai kelompok minoritas di Kecamatan Sako, tetapi mereka dapat hidup bersama dalam wilayah yang sama, sebagai satu komunitas sehingga mereka saling membutuhkan antara satu sama lain. Olsen (1991:413) mengungkapkan koeksistensi, atau pluralisme budaya merupakan kebijakan mendorong pelestarian, yakni kebijakan mendorong pelestarian keragaman etnik dan rasial serta memperlakukan semua kategori penduduk secara setara. Dalam pola demikian, kelompok minoritas memang mungkin saja membaur sejauh kehendak mereka sendiri, tiada satu pun bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang ditoleransi.

Kebijakan Pemerintah terhadap Minoritas

Sesungguhnya dalam negara kita telah diatur landasan hukum tentang kebebasan dalam memeluk agama bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama, dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam rangka menerjemahkan keinginan dari UUD 1945 tersebut dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dianggap mengancam keharmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI, terus berupaya mengembangkan kebijakan yang bertujuan membangun keharmonisan hubungan di antara sesama umat beragama.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa: PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Keputusan Menag No. 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Umat Beragama.

Berkenaan dengan kebijakan di atas Muhaimin (2004:18) menyebutkan bahwa langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah mensosialisasikan prinsip dasar kerukunan yaitu tidak saling mengganggu antara kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda. Dengan kebijakan seperti ini pada masa Mukti Ali sebagai Menteri Agama diperkenalkan prinsip *agree in disagreement*. Kemudian pada masa Alamsyah Ratu Prawira Negara dikembangkan pendekatan trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern, antar, dan antara umat beragama. Selanjutnya pada masa Munawir Sadzali sampai Malik Fajar, disamping meneruskan kebijakan trilogi kerukunan, juga kebijakan kerukunan yang dinamis bertujuan untuk membangun kerja sama sosial yang lebih luas di antara umat beragama. Pada saat Menteri Agama Tolkhah Hasan dan Said Agil Almunawar lebih diwujudkan pada rasa kemanusiaan dengan kebijakan pengembangan wawasan multikultural serta dengan pendekatan yang bersifat *bottom up*.

Untuk itu, dalam rangka mengembangkan kebijaksanaan tersebut, perlu dilakukan penguatan kerukunan antarumat beragama, dengan pola pengembangan pluralisme dan multikulturalisme sebagai suatu kebijaksanaan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan Departemen Agama setempat serta semua *stakeholder* yang ada daerah ini, berupaya mengembangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karenanya Pemerintah Kota Palembang telah memberlakukan kebijaksanaan: pengembangan kerukunan, pluralisme dan multikulturalisme, memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok maupun golongan dalam berbagai kesempatan dalam sektor kehidupan, untuk itu Bimas Katolik Kanwil Sumatra Selatan sendiri telah melakukan pembinaan sesuai dengan petunjuk dan prosedur dari menteri, demikian diungkapkan Bapak Alfonso.

Dalam kaitan tersebut pengembangan wawasan multikulturalisme pada segenap unsur dan lapisan masyarakat diharapkan adanya kesadaran masyarakat. Masyarakat diharapkan mau menerima dan mengakui

perbedaan, mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif, dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat kepada keragaman keyakinan, tradisi, adat, maupun budaya. Dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap tolong menolong di antara umat beragama sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari nilai-nilai ajaran agama masing-masing. Dengan cara ini, masyarakat dapat melaksanakan ajaran agamanya dan secara sosial dapat hidup berdampingan. Dengan demikian, masyarakat secara bersama-sama dapat mewujudkan peradaban sekaligus membawa negara ini pada posisi yang kuat dalam percaturan bangsa-bangsa.

Sehubungan dengan pengembangan kebijaksanaan pusat oleh daerah, dan dalam rangka mewujudkan Palembang sebagai Kota Metropolitan, cerdas, dan berkualitas, maka pemerintah setempat telah berbenah dan memperbaiki diri dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang (pendidikan, sarana, prasarana, transportasi, mental spiritual, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusianya yang berkualitas) tanpa memandang perbedaan. Pembangunan dilakukan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan suasana kerukunan intern dan antarumat beragama di daerah tersebut. Menjawab posisi Sako khususnya dan Palembang umumnya sebagai masyarakat yang pluralistik dan multikulturalis, pemerintah setempat telah melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, antara lain memfasilitasi terbentuknya wadah kerukunan umat beragama mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan. Pembentukan wadah tersebut dalam rangka: meningkatkan kerukunan antarumat beragama; melakukan dialog antarumat beragama; melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada umat beragama; melakukan dialog lintas agama; mengadakan kegiatan secara bersama-sama antara Katolik dan Islam (dialog pengembangan wawasan multikultural); memberikan kebebasan setiap agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan tidak saling mencurigai dan tidak saling menghambat; memberikan kesempatan setiap kelompok

untuk mengekspresikan diri dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan tradisi masing-masing.

Berkaitan dengan konsep multikulturalisme dan pluralisme¹⁸ Ato Mudzar mengungkapkan bahwa dalam masyarakat yang multikulturalisme, asumsi tentang subordinat dan dominan group itu tidak ada, karena setiap kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, dan bekerja sama dengan kelompok lain. Dengan demikian, Ato Mudzar berkesimpulan bahwa ada tiga syarat bagi adanya suatu masyarakat multikultural, yaitu adanya pluralisme masyarakat, adanya semangat untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama, adanya kebanggaan mengenai pluralisme tersebut.

Melihat apa yang diungkapkan Ato, sesungguhnya masyarakat Palembang, khususnya Sako telah memenuhi syarat yang dimaksud, yakni dengan mengembangkan prinsip-prinsip kesamaan kesempatan mengekspresikan diri, hidup berdampingan dan bekerja sama antara berbagai kelompok—terutama Katolik selaku minoritas dan Islam selaku mayoritas—serta dapat menerima keberbedaan dalam beragama. Dengan adanya sikap saling kerja sama di antara kelompok Katolik dan Islam membuktikan bahwa kedua kelompok ingin meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, keutuhan suatu daerah dapat memperkuat solidaritas di antara mereka.

Apa yang diungkapkan Ato senada dengan yang disampaikan Djohan Effendi, bahwa pluralisme lahir dari kesadaran dan kesediaan menerima perbedaan untuk kemudian mengolahnya sebagai unsur kreatif masyarakat kita sebagai sebuah kesatuan yang mengandung

dan merangkul kemajemukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan kerukunan umat beragama, seperti: memberdayakan institusi keagamaan; membimbing umat beragama agar meningkatkan iman dan taqwa; melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama; mendorong peningkatan pengamalan dan pelaksanaan ajaran agama; mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dan damai dalam bingkai Pancasila dan konstitusi dalam tertib hukum bersama.

Untuk itu, diharapkan terwujud masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasis hati nurani yang disinari oleh ajaran agama; terhindar perilaku radikal, ekstrem, dan tidak toleran serta eksklusif dalam kehidupan beragama; terbina masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan dan menghormati perbedaan melalui internalisasi melalui ajaran agama.

Dampak Interaksi Sosial Minoritas - Mayoritas

Interaksi sosial mengalami proses dinamis. Proses tersebut dapat berlangsung dengan adanya pertukaran sosial dalam rangka meningkatkan relasi di antara pihak satu dengan yang lainnya. baik itu pertukaran informasi, kerja sama, penyatuan persepsi, dan kesamaan bertindak. Interaksi sosial yang terjadi selama ini antara Katolik sebagai kelompok minoritas dan Islam selaku mayoritas di Kecamatan Sako, berdampak pada adanya kesamaan dalam pemahaman keyakinan dan kepercayaan pada ajaran agama masing-masing. Masyarakat setempat telah melakukan kerja sama dalam segala hal. Adanya sikap kesetaraan di antara kedua kelompok serta tidak menonjolkan perbedaan (mengedepankan

¹⁸ *Multikulturalisme* adalah suatu konsep yang menunjukkan kepada suatu masyarakat yang mengedepankan *prularisme budaya*. Budaya adalah istilah yang menunjukkan kepada semua aspek simbolik dan yang dapat dipelajari tentang masyarakat manusia, termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum dan adat istiadat. Adapun pluralisme adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural, lihat tulisan Ato Mudzar tentang "Tantangan Kontribusi Agama Dalam mewujudkan Multikulturalisme" dalam Jurnal Harmoni hal 11, Volume III, Nomor 11, Juli-September 2004

konsep multikulturalisme), berdampak pada cairnya sikap-sikap eksklusivisme di antara keduanya, terbangunnya integrasi sosial yang lebih kondusif di berbagai sektor kehidupan, terciptanya stabilitas keamanan di daerah, memperkokoh eksistensi kedua kelompok dalam pengembangan solidaritas kedaerahan dan kebangsaan sehingga terbentuknya suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai.

Kerukunan hidup beragama yang dikehendaki tidak sekadar berupa menjaga dan memelihara situasi tidak ada pertentangan dan ketegangan. Situasi rukun harus dilihat dari konteks perkembangan masyarakat yang sedang membangun, yang menghadapi aneka tantangan dan persoalan. Ini berarti kerukunan dalam interaksi yang ingin diwujudkan adalah suatu keadaan dinamis yang merupakan bagian dari pertumbuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan kerukunan dalam interaksi kehidupan antarumat beragama, setiap orang, kelompok atau umat perlu saling toleransi, tenggang rasa dan lapang dada, sekalipun ini terkesan tidak mudah. Perlu dikembangkan sikap keberagamaan yang moderat dalam rangka mendukung kerukunan hidup beragama agar tidak mengganggu keberadaan pihak lain yang berbeda agama. Ditingkatkan kualitas akhlak di kalangan umat beragama, agar tidak merasa benar sendiri. Dengan demikian, tidak muncul sikap ekstrem dalam beragama karena sikap ini dapat memicu konflik yang tidak saja di tingkat eksternal suatu agama, tapi internal agama itu sendiri.

Pada saat Soeharto menjabat sebagai presiden beliau mengungkapkan, bahwa toleransi agama bagi kita adalah pengakuan adanya kebebasan setiap warga negara untuk memeluk sesuatu agama yang menjadi keyakinannya dan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Toleransi agama jelas meminta kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya sikap *agree in disagreement* yaitu setuju dalam perbedaan. Setiap orang mempunyai keyakinan bahwa agama yang dianutnyalah yang paling benar, sehingga orang tersebut punya kekuatan dan keyakinan untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya tersebut. Dengan keyakinan agama yang dianutnya adalah paling benar, maka timbullah kegairahan untuk

berusaha supaya tindakannya sesuai dengan keyakinannya, sehingga dia akan mengakui bahwa selain adanya perbedaan dalam agama masing-masing maka terdapat juga persamaan.

Atas dasar inilah maka akan lahir perasaan saling harga-menghargai, hormat-menghormati satu sama lain antara individu ataupun kelompok, baik satu kelompok agama, apalagi dengan kelompok agama lainnya. Apabila nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nilai-nilai agama teraktualisasi secara baik dalam kehidupan masyarakat Palembang, maka apa yang menjadi keinginan masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan dapat berjalan lancar. Dengan demikian, program pencanangan oleh pemerintah untuk mewujudkan Palembang sebagai kota Metropolitan dapat terwujud.

Harapan pemerintah tersebut merupakan perwujudan pembangunan sebuah daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita daerah sebagai bagian dari bangsa. Daerah turut berpartisipasi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkemakmuran atas rida Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan sebuah daerah atau bangsa harus juga mencerminkan atau refleksi upaya pengamalan ajaran agama yang ada di dalam daerah atau bangsa tersebut. Dengan demikian, umat beragama mempunyai rasa memiliki yang lebih besar terhadap pembangunan daerahnya. Dan pada akhirnya mendorong partisipasi yang lebih besar pula untuk menyukseskannya. Cara pandang demikian, akan meningkatkan kesadaran bahwa pembangunan agama merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa.

PENUTUP

Mempelajari gambaran sebelumnya dalam tulisan ini, dapat disimpulkan dan dijelaskan bahwa kelompok minoritas lazimnya terkait dengan satu etnik sekaligus agama tertentu (*etnoreligius*). Kelompok Katolik selaku minoritas di daerah tersebut hidupnya mengelompok di satu tempat, namun mereka tetap membaur dengan kelompok lainnya terutama Islam selaku mayoritas. Mereka juga mampu mengakulturasi diri dengan sikap dan budaya setempat. Lebih lanjut interaksi intern kelompok minoritas yang sangat baik dan positif

serta saling mendukung dan tolong-menolong di antara mereka perlu terus ditingkatkan agar terjadi kekohesivan di antara mereka. Kelompok minoritas dan mayoritas harus tetap mempertahankan hidup berdampingan dalam keberbedaan (multikulturalisme), agar tercipta rukun dan damai, saling memahami, saling pengertian, saling toleran satu sama lainnya, saling mengakui eksistensi masing-masing selaku umat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan melalui interaksi sosial yang positif dan bertanggung jawab.

Dalam interaksi sosial di masyarakat tersebut, komunikasi, dan koordinasi yang terus-menerus dan efektif dengan berbagai kelompok umat beragama dan pihak terkait, dapat menghilangkan adanya prasangka diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Adanya keterlibatan kelompok minoritas dalam setiap kegiatan (kepengurusan) dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat dengan tidak memandang perbedaan agama, kelompok, dan golongan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat untuk tidak terdiskriminasi. Dalam meningkatkan kerukunan umat beragama, masyarakat sebaiknya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang telah mengeluarkan kebijaksanaan pengembangan kerukunan antarumat beragama dalam rangka mengembangkan pluralitas budaya dalam masyarakat dan pengembangan wawasan multikultural, mendorong peningkatan pengamalan dan pelaksanaan ajaran agama bagi masyarakat, mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dan damai.

Masyarakat beragama di daerah setempat dapat memanfaatkan wadah kerukunan umat beragama serta Forum Komunikasi Umat Beragama yang ada, untuk melakukan dialog lintas agama dan lain-lain. Dengan demikian, keinginan dan unek-unek umat beragama dapat disalurkan melalui wadah tersebut. Wadah (forum) tersebut merupakan sarana yang dapat menjembatani antara kepentingan umat dengan pemerintah. Dengan demikian, sikap-sikap eksklusivisme dan egoisme kelompok dapat cair bila terus dilakukan dialog dan interaksi sosial di antara umat beragama, terutama antara minoritas dan mayoritas. Sehingga terbangun integritas sosial kedaerahan dan tercipta suasana yang harmonis sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2002. "Religious Tolerance in a Democratic and Multicultural Society", Dalam *Communal Conflict in Contemporary Indonesia*. Jakarta: PBB UIN Jakarta in Cooperation with Konrad Adenauer Stiftung.
- Dahlan, Ahmad. 2004. *Konflik Antar etnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*.
- Badan Litbang Agama, Departemen Agama. 1996. *Upaya Meningkatkan Moral, Etik, dan Akhlak Bangsa Melalui Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Dinamis*. Jakarta.
- Badan Litbang Departemen Agama RI. 1997. *Bingkai Sosio Kultural. Kerukunan Hidup Antarumat Beragama di Indonesia*, Seri 2. Jakarta.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Galia Indonesia.
- BPS. 2004. *Palembang Dalam Angka Tahun 2003*. Katalog BPS 1403.1671. Palembang.
- Brown, Ruper and Lepore, Lorella. 2003. *Dalam Anthony SR Mastead dan Mikes Hewstone, dalam tulisan Atho Mudzar: Pluralisme, Pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. 1992. Sambutan Presiden Soeharto pada peringatan Nuzulul Quran tanggal 19 Desember 1967 di Jakarta, dalam *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta.
- Eck, Diana L. 2005. *Amerika Baru yang Religius: Bagaimana Sebuah "Negara Kristen" Berubah Menjadi Negara dengan Agama Paling Religius*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Effendi, Djohan. *Pluralisme Realitas Sosial Dan Hubungan Antaragama: Bingkai Kultural dan Teologi-Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama.
- Effendi, Onong Uchjana. 1981. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Alumi.
- Fedi Yani S, Achmad. 1986. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Paham dalam Agama Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Johnson. 1986. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multi Kultural oleh Alo Liliwari, LKIS*, Jakarta. 2005.

- Jurnal Harmoni Volume I, Nomor 1, Januari-Maret 2002, *Jurnal Multikulturalisme dan Multireligius; Agama dan Keharmonisan Sosial*. Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Jakarta: LKIS.
- Mudzar, Atho. 2004. "Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikulturalisme" dalam *Jurnal Harmoni*, 3 (II).
- Muhaimin AG. 2004. *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI
- Poerwadarminto, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Purwasito, Adrik. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Malang: Muhammadiyah University Press.
- Santo Petros, Gereja Katolik. 2003. *Bersama dan Bersatu Membangun Gereja: Citra Gereja Basis, Awal Pejajaranan Paroki Santo Petrus*. Palembang.
- Shadily, Hasan. 1983. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara.
- Smith, Jane I. 2005. *Islam di Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sunarto, Kamanto. 2002. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Tonggak Sejarah, tth.

